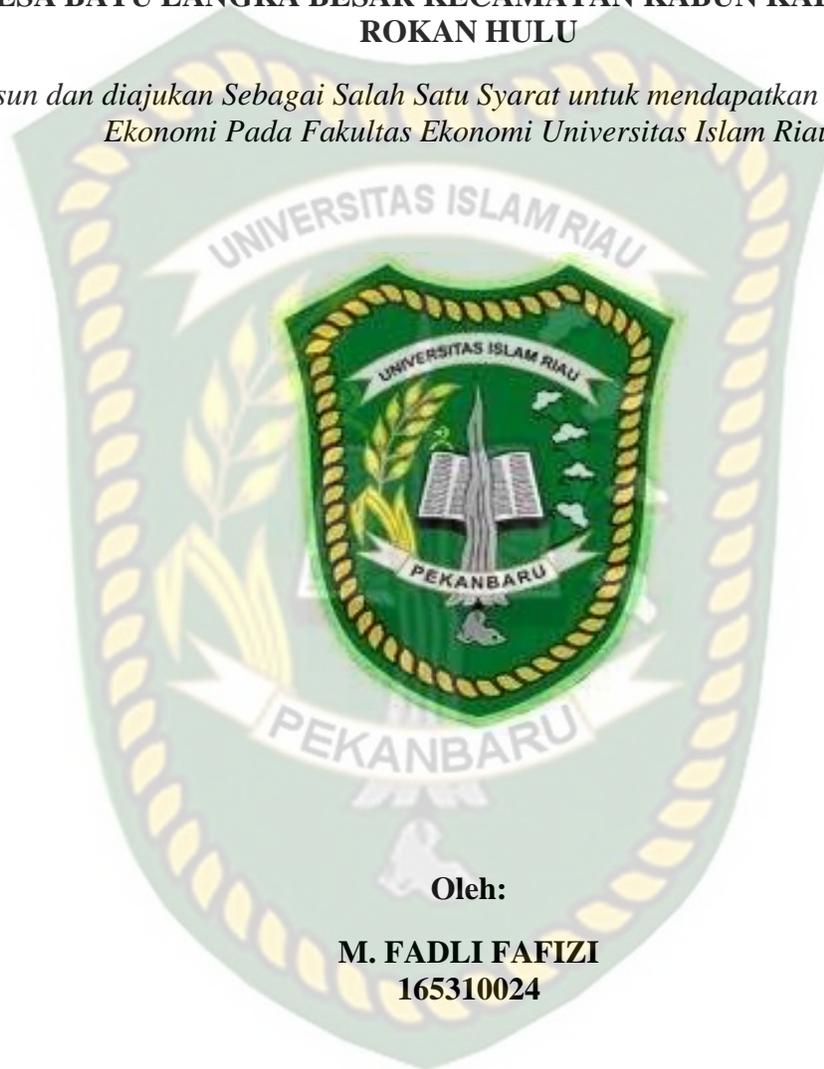


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DESA BATU LANGKA BESAR KECAMATAN KABUN KABUPATEN
ROKAN HULU**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**M. FADLI FAFIZI
165310024**

**JURUSAN AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKAN BARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Fadli Fafizi
NPM : 165310024
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa
Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Drs. Abrar M.Si, Ak., CA.

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.



KETUA PRODI

Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : M. Fadli Fafizi
NPM : 165310024
Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2020
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Sidang dibuka **Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA.** Dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Zulhelmy, SE, MSi, Ak., CA. 1 Struktur pemerintahan desa dimasukkan 2 Hal 44 neraca lajur tidak wajib 3 hal 45 tidak membuat aset tetap atau menyajikan aset tetap 4 hal 46 SAP belum bisa digunakan	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Halaman 36 Halaman 44 Halaman 45 Halaman 46	
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak. 1 Perbaiki abstraknya permasalahan belum jelas 2 Kaitkan hasil penelitian dengan terornya	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Diabstrak Bab 4	

Mengetahui

Dr. Hj. Siska, SE. M.Si Ak, CA

Disetujui

Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA.

Dr. H. Abrar, Drs. M.Si, Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : M. Fadli Fafizi
NPM : 165310024
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
Hari/Tanggal : Semir 16 November 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **69,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 16 November 2020
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

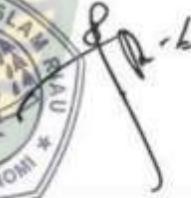
*) Coret yang tidak perlu

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9 oktober 2020	X	- Teknis, perbaiki bab 4 hasil penelitian dan pembahasan	
12 oktober 2020	X	- Perbaiki bab 4 hasil penelitian dan pembahasan	
14 oktober 2020	X	Perbaiki bab 4 hasil penelitian dan pembahasan	
21 oktober 2020	X	- Perbaiki bab 4 hasil penelitian dan pembahasan	
2 november 2020	X	- ACC Seminar Hasil	

Pekanbaru, 05 Desember 2020

Wakil Dekan I




Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1640/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 15 November 2020, Maka pada Hari Senin 16 November 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : M. Fadli Fafizi |
| 2. N P M | : 165310024 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. |
| 5. Tanggal ujian | : 16 November 2020 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 64,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Hj. Ellvan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA
2. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
3. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak


(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak


(.....)

Pekanbaru, 16 November 2020

Mengetahui
Dekan,





Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1640 / Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : M. Fadli Fafzi
N P M : 165310024
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Uji	Jabatan
1	Dr. Abrar, M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Disampaikan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 November 2020

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

- Tembasan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

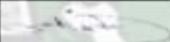
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : M. Fadli Fafizi
NPM : 165310024
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
Hari/Tanggal : Senin 16 November 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

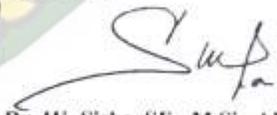
1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 69,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 16 November 2020
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoan Pekanbaru Telp 647647

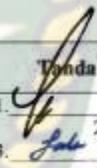
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : M. Fadli Fafizi
NPM : 165310024
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu.
Pembimbing : 1. Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 26 Agustus 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

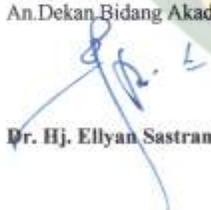
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. _____
3.	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Pekanbaru, 26 Agustus 2020
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 361/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohm
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

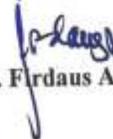
Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : M. Fadli Fafizi
 N P M : 165310024
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 05 Mei 2020
 Dekan,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : M.FADLI FAFIZI
NPM : 165310024
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA BATU LANGKA BESAR KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 15 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 2020

Yang memberikan pernyataan,



M. Fadli Fafizi

NPM: 165310024

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DESA BATU LANGKA BESAR KECAMATAN KABUN KABUPATEN
ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh

M. FADLI FAFIZI
165310024

Tujuan pada skripsi ini ialah mengetahui apakah proses yang dilakukan pada Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Sektor Publik dan bagaimana pengelolaan keuangannya.

Pada hasil penelitian yang dibuat oleh penulis bahwa ditemukan permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa Batu Langka Besar, di mana untuk persedian di desa tersebut tidak menghitung nilai persedian yang tersisa diakhir periode, selanjutnya pemerintah desa Batu Langka Besar tidak menambahkan total nilai aset tetap pada laporan kekayaan milik desa tahun 2017 kedalam total aset laporan kekayaan milik desa tahun 2018.

Hasil penelitian pada penerapan akuntansi keuangan Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu bahwasanya Pemerintah Desa Batu Langka Besar belum sepenuhnya sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesian Kompartemen Sektor Publik.

Kata Kunci: Siklus Akuntansi dan Akuntansi Keuangan

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING
IN THE GOVERNMENT OF BATU LANGKA BESAR VILLAGE DISTRICT
KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRACT

By:

M. FADLI FAFIZI
165310024

The purpose of this thesis is to find out whether the proses carried out in the Government Vilage Batu Langka Besar kabun district Rokan Hulu regency in indonesia accountan association public sector compartement and how to manage finances.

In the results of the research made by the author, there were problems that occurred in the village government of Batu Langka Besar, where the supplies in the village did not calculate the remaining stock value at the end of the period, then the Batu Langka Besar village government did not add the total value of fixed assets to the wealth report. village property in 2017 into the total assets of the village-owned wealth report in 2018.

Research results on the application of government financial accounting Batu Langka Besar kabun district rokan hulu regency that indosian accounting association public sector accountants compartement.

Keywords: Accounting Cycle and Financial Accounting

KATA PENGANTAR

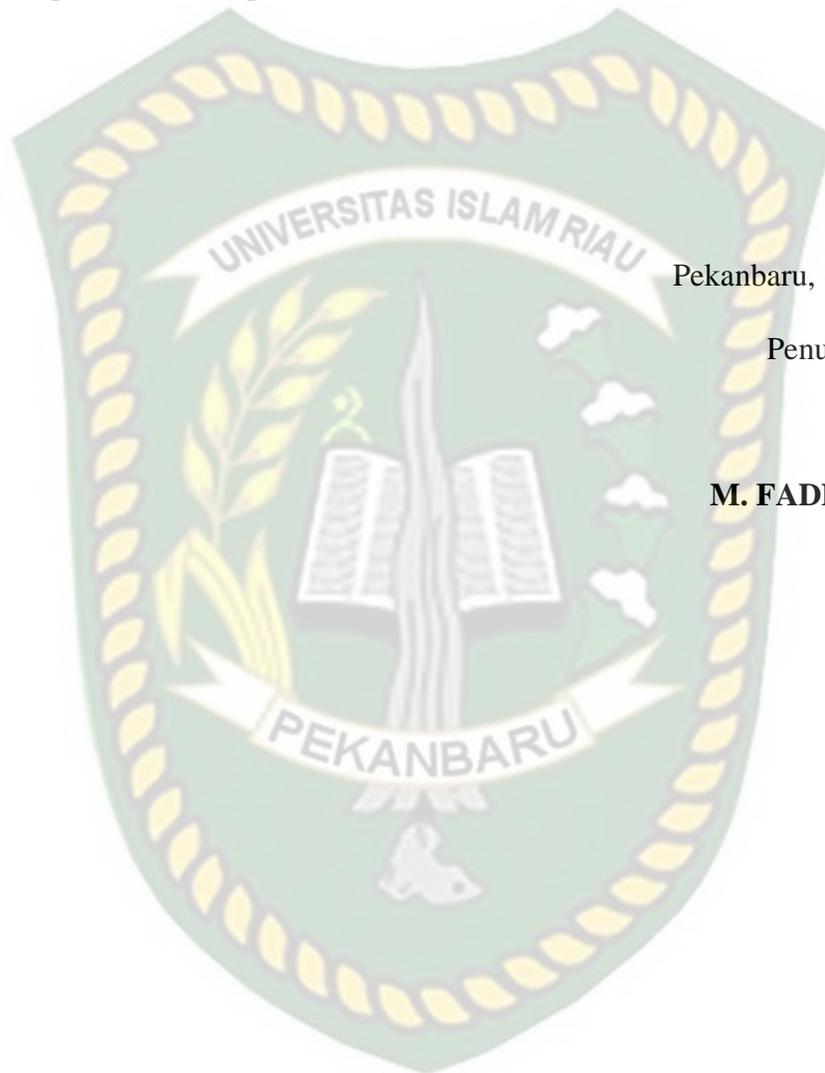
Bismillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahamat-nya kepada kita semua, serta atas izin-nya saya sebagai penulis bersyukur bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu**. Dan shalawat beserta salam tak jemu-jemu kita menghadihkan shalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Dalam proses pembuatan skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat kelulusan dalam sebuah ujian (oral comprehensive) disalah satu fakultas ekonomi jurusan akuntansi S1 Universitas Islam Riau.

Proses pembuatan skripsi ini tidak jauh dari dukungan-dukungan dari beberapa pihak yang telah mendorong dan memotivasi penulis agar selalu semangat, giat, dan tekun dalam melaksanakannya. Saya sebagai penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan motivasinya dari pihak-pihak tersebut ialah sebagai beriku:

- 1 Kepada Allah SWT, yang telah memudahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini baik dikala dalam kondisi yang sulit maupun senang selalu diberi petunjuk oleh-nya.
- 2 Kepada kedua orang tua dan saudara kandung saya, dimana mereka sangat berperan penting bagi saya dalam proses pembuatan skripsi yang mana mereka selalu memberikan dorongan, motivasi, dan do'a dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.

- 3 Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL, saya sangat berterima kasih kepada beliau telah menerima saya dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
- 4 Bapak Drs. Firdaus AR,SE.,M.Si., Ak,CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- 5 Ibu Hj. Siska, SE., M.Si.,AK,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- 6 Bapak Drs. H.Abrar, M,Si, Ak, CA selaku pembimbingan skripsi saya yang telah membimbing, mengajari, memotivasi, kritik, dan saran dalam menyelesaikan skripsi yang telah saya buat.
- 7 Kepada teman-teman saya khususnya kelas A angkatan 2016 akuntansi S1 yang banyak memberikan saya ilmu yang bermanfaat dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan dan berjuang dalam mendapatkan gelar S.E.
- 8 Terima kasih juga kepada sahabat saya Samsurizal putra tama S.E yang selalu ada dalam membantu pembuatan skripsi ini ketika ada yang tidak saya pahami dan selalu siap untuk mengajari. Dan juga pasangan saya serta sahabat lainnya kalian luar biasa.
- 9 Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak mudah dan tidak sesempurna mungkin, tapi penulis berharap bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi yang membaca hasil skripsi ini dan berguna untuk lingkungan dan pendidikan.

10 Sekian dari penulis semoga Allah SWT selalu membalas dan memberikan rahmat-nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini



Pekanbaru, 2020

Penulis

M. FADLI FAFIZI

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi	10
2.1.2 Desa	11
2.1.3 Otonomi Desa	13
2.1.4 Pemerintah Desa	13
2.1.5 Akuntansi Pemerintah Desa	14
2.1.6 Prinsi-Prinsip Akuntansi Desa	15
2.1.7 Penggunaan Akuntansi Desa	16
2.1.8 Siklus Akuntansi Desa	17
2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.1.10 Laporan Keuangan Desa	20
2.1.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	21
2.2 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	24

3.2 Jenis Dan Sumber Data	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa.....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Desa	26
4.1.2 Demografi	27
4.1.3 visi dan Misi Desa.....	28
4.1.4 Keadaan Sosial.....	29
4.1.5 Struskur Organisasi.....	30
4.2 Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi.....	32
4.2.2 Proses Akuntansi.....	32
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Buku Kas Umum.....	32
Tabel 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak.....	35
Tabel 4.3 Buku Bank.....	37
Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	39
Tabel 4.5 Buku Besar: Kas.....	41
Tabel 4.6 Buku Besar: Pendapatan Transfer.....	42
Tabel 4.7 Buku Besar: Belanja Pegawai.....	43
Tabel 4.8 Buku Besar: Belanja Barang dan Jasa.....	43
Tabel 4.9 Perhitungan Aset Tetap.....	46
Tabel 4.10 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Apbedes
- Lampiran 3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- Lampiran 4 Daftar Inventaris
- Lampiran 5 Buku Kas Umum
- Lampiran 6 Buku Bank
- Lampiran 7 Buku Pajak
- Lampiran 8 Buku Kas Pembantu Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau biasa disebut dengan Undang-Undang desa, menjadikan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya unit pemerintahan yang turun langsung kelapangan serta mengetahui latar belakang kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Disitulah peran pemerintahan sangat dibutuhkan salah satunya ialah pelayan publik, hal ini disebabkan pengelolaan dana-dana desa atau masyarakat yang dikelola pemerintah harus transparansi. Sehingga pembiayaan sarana dan prasaran desa dengan baik, agar otonomi desa dapat berjalan dengan baik demi kemajuan desa tersebut.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terhadap desa sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan wewenang terkait pertimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Dimana pemerintahan pusat mengharapkan pemerintahan daerah dapat meningkatkan kemandirian yang dilakukan pemerintahan daerah khususnya dipemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dana desa. Adapun sumber pendapatan desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa
2. Dana desa yang bersumber dari APBN
3. Hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

4. Alokasi dana desa dari pemerintahan daerah setempat
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangam dari pihak ke-3
7. Pendapatan desa yang sah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 januari tahun 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif, adanya UU tentang desa menggantikan peraturan tentang desa yang terutang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa.

Pemerintahan desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB). Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam pengelola keuangan desa. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP 2005) bahwa tranparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan serta perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Sektor Publik (IAI-KSP 2015:12) tentang siklus akuntansi ialah beberapa tahapan kegiatan yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Dalam tahap pencatatan yaitu pengumpulan bukti-bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku yang dibuat.

Tahap penggolongan merupakan pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catat dan di nilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Tahap pengikhtisaran ialah melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Didalam laporan kekayaan milik desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama dan seimbang. Sehingga perlunya saldo debit dan kredit laporan dalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari pencatatan.

Tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap ahir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk

tahunan anggaran. Kemuadian laporan kekayaan milik desa berisi tentang aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember tahun tertentu.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) tahun 2015 pengelolaan keuangan desa meliputi, pertama perencanaan, yang meliputi rancangan peraturan desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama. Kedua pelaksanaan, meliputi semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ketiga penatausahaan, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Keempat pelaporan, kepala desa melaporkan laporan Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Kelima pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap ahir tahun anggaran. Keenam pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Provinsi wajib membina dan pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

Desa Batu Langka Besar ialah merupakan desa pemekaran dari salah satu Kecamatan Kabun dengan jumlah penduduk 430 KK atau sama dengan 1.702 jiwa, dengan luas lahan kurang lebih 47,920 M3. Desa Batu Langka Besar dalam memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes dalam memperoleh dana yang nanti yang mereka dapatkan kabupaten atau kota. Pada tahun 2017 Desa Batu Langka Besar menerima dana desa sebesar Rp813.597.000 (lampiran 7) kemudian terjadinya penurunan yang diterima dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp784.427.000 (lampiran 7) yakni dengan jumlah selisih sebesar Rp29.170.000. Disebabkan menurunnya penerimaan dana desa ialah berkurangnya pendapatan dari kabupaten/kota. Setelah dana desa diterima desa batu langka besar melakukan proses perencanaan dalam mengelola keuangan desa.

Dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun berbasis kas (*cash basic*). Basis kas ialah untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah.

Dalam uraian proses akuntansi yang dilakukan desa Batu Langka Besar bermula dari tahap awal pencatatan, proses pencatatan yang dibuat oleh kantor desa Batu Langka Besar sudah menggunakan komputeresasi dan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Berawal dari bukti-bukti transaksi, kemudian melakukan kedalam buku yang sesuai seperti: Buku Kas Umum (lampiran 5)

digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Bank desa (lampiran 6) digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 7) digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Selanjutnya Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 8) digunakan untuk mencatat semua kegiatan desa baik berupa penerimaan (dari bendahara, swadaya masyarakat) dan pengeluaran (belanja barang dan jasa, belanja modal), serta saldo kas. Buku Inventaris digunakan untuk mencatat barang-barang yang di miliki desa.

Selanjutnya setelah membuat tahap pencatatan kedalam buku-buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catat, desa Batu Langka Besar berkewajiban membuat pelaporan dari siklus akuntansi. Kegiatan yang di lakukan pada tahap ini yaitu: Pertama, membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (lampiran 2), dalam laporan ini berisi tentang jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Kedua, Laporan kekayaan Milik Desa (lampiran 1) laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah 31 desember dalam tahun tertentu. Desa Batu Langka Besar tidak membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Neraca Saldo, Penyesuaian dan Kertas Kerja, tidak membuat rekap bulanan, hanya membuat rekap tahunan.

Berdasarkan proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa batu langka besar ditemukan permasalahan.

Pertama, bendahara Desa Batu Langka Besar belum menghitung nilai persediaan bahan abis pakai diakhir periode pada laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 dan 2018. Kedua, pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat Peralatan dan Mesin senilai Rp18.400.000, Gedung dan Bangunan senilai Rp104.683.600 dan di tahun 2018 terjadi pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin senilai Rp344.143.070, gedung dan bangunan senilai Rp76.969.000. Namun Desa Batu Langka Besar tidak menambahkan saldo ahir aset tetap pada tahun 2017 senilai Rp123.083.600 ke dalam saldo ahir aset tetap 2018.

Sesuai dengan keterangan yang di jelas kan di atas maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul tentang **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang di teliti adalah untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi keuangan pada pemerintah desa batu langka besar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini ialah agar mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pada desa batu langka besar kecamatan kabun kabupaten rokan hulu.

Sedangkan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bertambah nya pengetahuan penulis tentang bidang akuntansi keuangan desa.
- b. Bagi Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu bahwasanya penelitian ini merupakan masukan yang berguna agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan akuntansi keuangan desa.
- c. Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi dan referensi untuk topik yang sama ataupun yang berhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengerjaan proposal ini, yang di bagi atas lima bab dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistem penulisannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang penguraian teori-teori pendukung berhubungan dengan pengertian akuntansi, konsep dasar akuntansi, pengelolaan keuangan desa, penyusunan laporan keuangan, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

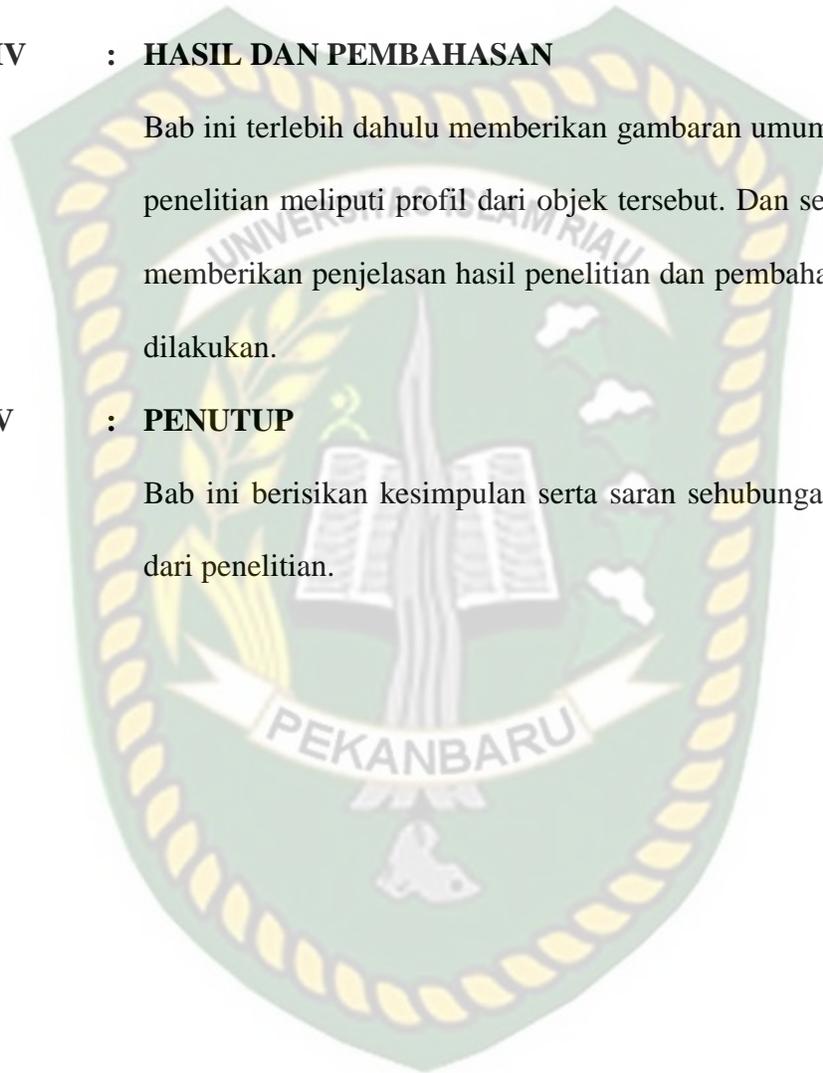
Menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terlebih dahulu memberikan gambaran umum tentang objek penelitian meliputi profil dari objek tersebut. Dan selanjutnya akan memberikan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran sehubungan dengan hasil dari penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam hal mencatat, mengelompokan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta perinterpretasian atas hasilnya bagi pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan.

Menurut Sujarweni (2015:120) defenisi akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Sasongko,dkk (2016:2) defenisi akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan non keuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*).

Sedangkan menurut Rahman (2013:4) mendefinisikan akuntansi adalah Sebagai sekumpulan pengetahuan yang mempelajari rekayasa dalam menyediakan jasa dalam berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Adapun menurut Carl S. Dkk (2014:3) akuntansi diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pengguna kepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan.

Kemudian menurut Hanafi dan Halim (2016:27) Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa di pakai untuk penilaian (*judgment*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Dari kesimpulan pengertian akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.2 Desa

Defenisi desa secara umum ialah pembagian wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang kepala desa. kata “desa” berasal dari bahasa sangsekerta yaitu kata “dhesi” yang memiliki arti “tanah kelahiran”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa dapat diartikan “sebagai kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota)“.

Sedangkan menurut Landis dalam buku bastian (2015:6) desa adalah sebuah wilayah dengan penduduk tidak lebih dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri sebgai berikut :

- 1) saling mengenal dengan baik kepada orang lain

- 2) bersama-sama untuk saling tenggang rasa terhadap budaya dan suku
- 3) pendapatan atau pekerjaan penduduk desa sangat tergantung pada cuaca dan iklim

Berdasarkan penjelasan di atas ditarik kesimpulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Selain itu desa juga menjelaskan soal wewenang hak asal usul desa sesuai PERMENDES No. 1/2015 pada pasal 3 ialah sebagai berikut:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
- b. prata hukum adat
- c. pemilikan hak tradisional
- d. pengelolaan tanah kas desa
- e. pengelolaan tanah ulayat
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa
- g. masa jabatan kepala desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang siapa yang berkewajiban menjalankan wewenang ialah bahwa segala penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia adalah kewajiban pemerintah desa.

2.1.3 Otonomi Desa

Ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa mampu melakukan perbuatan hukum publik dan hukum perdata, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap negara kesatuan republik indonesia sebab desa ialah bagian tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia.

2.1.4 Pemerintah Desa

Menurut Sujarweni (2015:121) Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Sedangkan menurut R bintaro dalam bastian (2015:6) pemerintah desa merupakan suatu tingkatan pemerintah terkecil yang dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas mengenai urusan pemerintah di tingkat desa dalam hal pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam UU di jelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10%. Di mana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara.

Kewenangan pemeritah desa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 :

a. Kepala desa

Kepala desa ialah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang penuh dalam kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan membina kehidupan masyarakat desa.

b. Badan permusyawaratan desa (BPD)

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

c. Sekretaris

Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik itu mempersiapkan pengelolaan administrasi desa, maupun mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

2.1.5 Akuntansi Pemerintah Desa

Menurut Sujarweni (2015) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah: pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.1.6 Prinsip-prinsip akuntansi desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan di patuhi oleh pembuat setandar akuntansi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan pemerintah lainnya.

Menurut IAI-KASP (2015:7) ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (*asset*), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berinteraksi. Harga perolehan ini bernilai objek sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b) Prinsip realisasi pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasn mengenai bagaimana mengukurkan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (*asset*) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada

dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c) Prinsip Objektif

Prinsip yang mengarahkan pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d) Prinsip pengungkapan penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kauntitatif yang dapat mempengaruhi keputusan.

e) Prinsip akuntansi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga mempunyai nilai bidang, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.1.7 Penggunaan Akuntansi Pada Pemerintah Desa

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI 2015:6) pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya sebagai berikut:

a. Pihak internal

Pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala urusan/kepala saksi.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingatkan bahwa anggaran desa berasal dari baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

d. Pihak lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya lembaga swadaya desa, RT/RW, dan sebagainya.

2.1.8 Siklus Akuntansi Desa

Menurut Dwi, dkk (2012:63) siklus akuntansimerupakan keseluruhan proses yang digunakan oleh entitis untuk mengelola data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan.

Siklus akuntansi menurut IAI-KSP 2015 siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi:

1) Tahap pencatatan

Dalam tahap ini merupakan tahap awal dari siklus yang berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya melakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

2) Tahap penggolongan

Tahap selanjutnya setelah melakukan pencatatan berdasarkan bukti-bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan bukti catatan transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catat dan dinilai kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

3) Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran adalah tahap yang dilakukan untuk pembuatan neraca saldo serta kertas kerja. Laporan kekayaan milik desa berisikan akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan kekayaan milik desa, jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan dengan benar.

4) Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap ahir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut:

- a. Membuat laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember tahun tertentu.

2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No 6. Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa meliputi yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya Pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan desa dilaksanakan dalam masa 1 (tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Maka dapat di simpulkan bahwa pada pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Dalam keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.10 Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:124-125) langkah dalam pembuatan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang terbuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
3. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran di buatlah laporan realisasi anggaran desa.

Laporan keuangan pemerintah desa mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah

desa yang berguna untuk para pemakai dalam menilai kebijakan lalu dan merencanakan kebijakan dimasa yang akan datang. Kepala desa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah desa.

2.1.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sumpeno (2012:213) anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:125) APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa ini dapat berupa semua penerimaan uang yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa digolongkan berdasarkan kelompok.

Menurut Pasal 72 UU pendapatan desa desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - a. Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pemungutan desa.

2. Pendapatan Transfer desa

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Pasal 1 PP No. 43 2014.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan semua meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitiannya adalah akuntansi keuangan pada Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Batu Langka Besar yang diantaranya yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, laporan APBDes, buku kas pembantu kegiatan, laporan realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

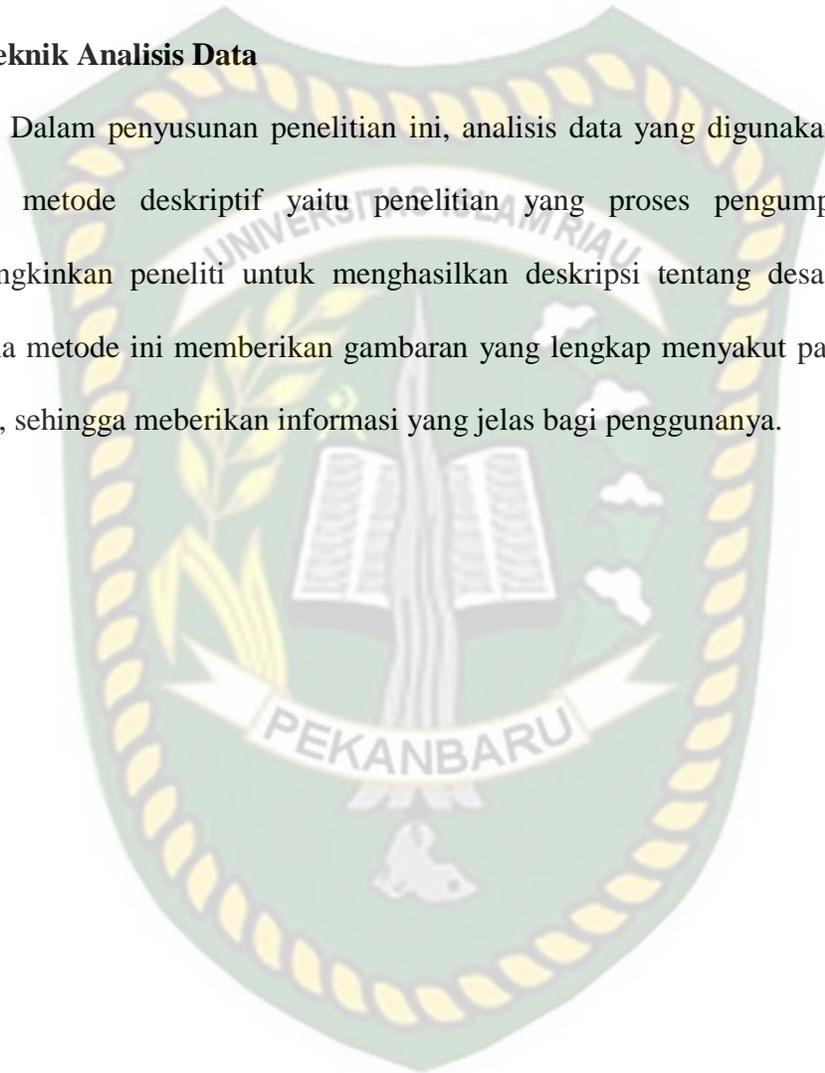
3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala bagian keuangan desa serta staf-staf yang ada pada Desa Batu Langka Besar.

3.3.2 Mendokumentasikan dengan memfotokopi data keuangan pada desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu periode 2017-2018.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang desa yang diteliti. Dimana metode ini memberikan gambaran yang lengkap menyakut pada objek yang diteliti, sehingga meberikan informasi yang jelas bagi penggunanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Batu Langka Besar

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Batu Langka Besar

Desa Batu Langka Besar merupakan pemekaran dari Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Pada Tahun 1990 Desa Batu Langka Besar memekarkan diri dari Desa Kabun yang pada saat itu masih masuk dalam Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar. Kemudian pada Tahun 2003 pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Desa Batu Langka Besar, masuk secara hukum bagian dari wilayah dari Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 430 KK sama dengan 1.702 jiwa, dengan luas lahan kurang lebih 47.920 M³. Desa Batu Langka Besar terus berkembang dengan kepala desa sebagai berikut:

- a. Tahun (1999-2002) Rusdan R. Lubis (Kades) dan Muhammad Nasir. ST (Sekdes)
- b. Tahun (2003-2007) Rusdan R. Lubis (Kades) dan Muhammad Nasir. ST (Sekdes)
- c. Tahun (2007-2012) Rusdan R. Lubis (Kades) dan Muhammad Nasir. ST (Sekdes)
- d. Tahun (2012-2014) Rusdan R. Lubis (Kades) dan Muhammad Nasir. ST (Sekdes)
- e. Tahun (2014-2016) Muhammad Nasir ST. (Kades dan Sekdes)

4.1.2 Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Desa batu langka besar termasuk salah satu desa di Kecamatan Kabun yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Kabun Kec, Kabun Kab, Rokan Hulu
Sebelah Selatan	: Desa Kualan Kec, XXXI Koto Kampar Kab, Kampar
Sebelah Barat	: Desa Kabun Kec, Kabun Kab, Rokan Hulu
Sebelah Timur	: Desa Batu Langka Kecil Kec, Kuok Kab. Kampar

b. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Batu Langka Besar sekitar $\pm 47,920$ M³. Terdiri dari:

1. Pemukiman : 110 Ha
2. Pertanian/perkebunan : 2500 Ha
3. Perkebunan milik desa : 2 Ha
4. Perkantoran dan sekolah : 3 Ha
5. Lapangan olahraga : 3 Ha
6. Lahan cadangan : 50 Ha

Jumlah penduduk Desa Batu Langka Besar:

Kepala keluarga : 658 orang

Laki-laki : 1281 orang

Perempuan : 1261 orang

Total : 2542 orang

4.1.3 VISI DAN MISI DESA BATU LANGKA BESAR

VISI :

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Batu Langka Besar saat ini tentang yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang di miliki desa Batu Langka Besar sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Desa (PAD. Dana desa dari tingkat II dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan, aparatur pemerintah dan kelembagaan yang ada di desa tersebut.

MISI :

- Menjadikan kinerja pemerintah Desa Batu Langka Besar, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural.
- Mewujudkan nilai-nilai masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa aman.

- Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
- Menjadikan stbilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesua fropesi dan kemampuan.
- Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadi suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila da konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkankesadaran nasionalisme.

4.1.4 Keadaan Sosial

a. Mata Pencarian

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Petani | : 480 orang |
| 2. Pedagang | : 95 orang |
| 3. PNS | : 20 orang |
| 4. Guru | : 25 orang |
| 5. Bidan/Perawat | : 7 orang |
| 6. Polri | : 3 orang |
| 7. Tukang | : 12 orang |

8. Swasta : 155 orang
9. Supir : 20 orang
10. Dll : 85 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

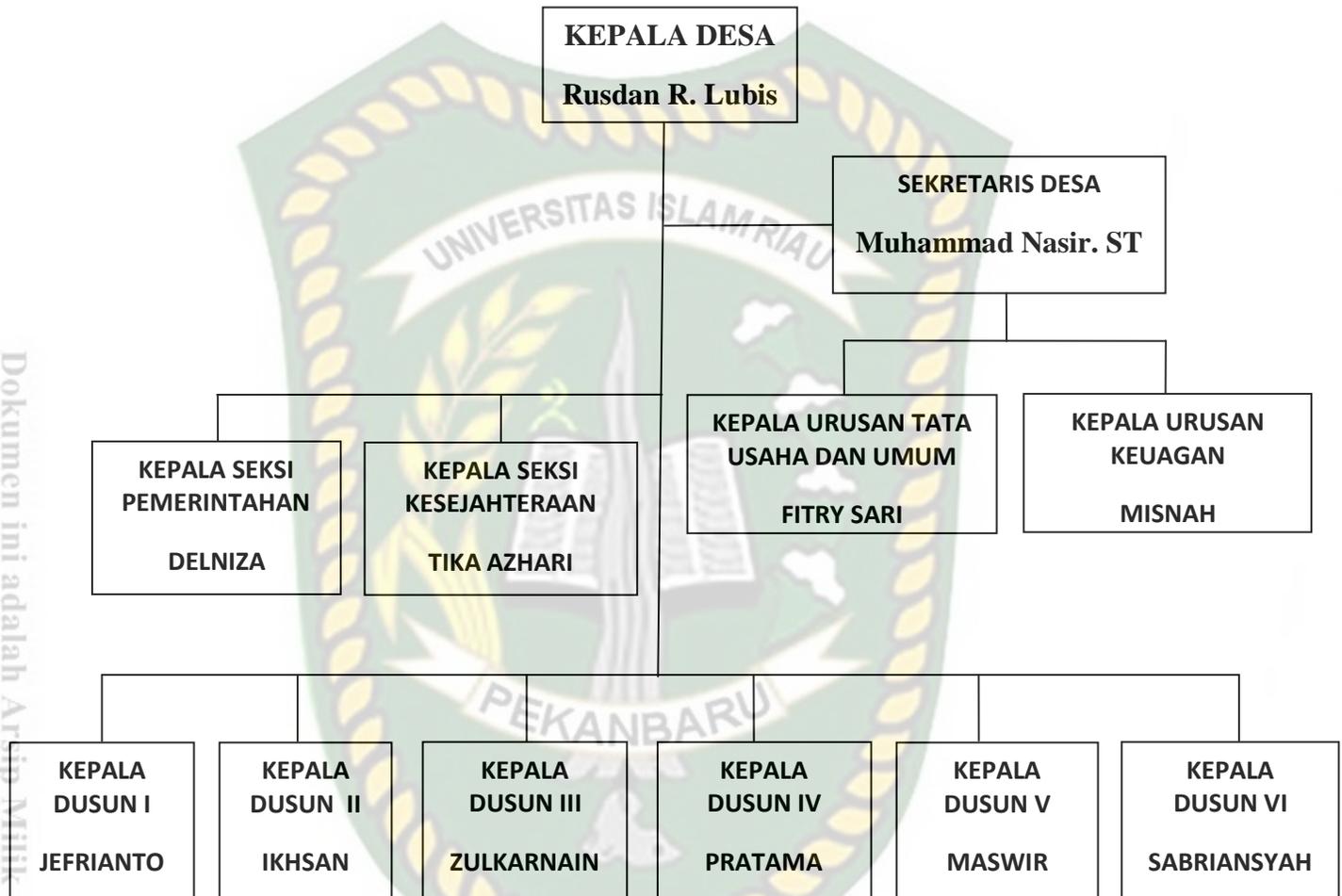
1. LPM : 1 KELOMPOK
2. PKK : 1 KELOMPOK
3. KELOMPOK TANI : 6 KELOMPOK
4. POSYANDU : 2 KELOMPOK
5. ORMAS/LSM : 1 KELOMPOK
6. DLL : 10 KELOMPOK

4.1.5 Struktur Organisasi

Dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab pada struktur organisasi harus didasari dengan pedoman yang menjadikan pembagian tugas dalam organisasi tersebut, sehingga berjalan dengan baik. Desa Batu Langka Besar memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar, oleh karena itu Desa Sei Alim Hassak harus memiliki pedoman dalam struktur organisasinya.

Untuk mengetahuinya struktur organisasi Desa Batu Langka Besar dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BATU LANGKA
BESAR KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**



4.2 Hasil Penelitian

Pada penjelasan bab ini hasil penelitian di Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, “Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab I dan penjelasan secara teoritis yang disajikan pada bab II, maka penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi yang diterapkan”.

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Pengakuan Dasar Akuntansi

Dalam transaksi yang dilakukan desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yaitu dana desa dicatat berdasarkan *cash basis*, dimana proses pencatatan transaksi akuntansi dicatat pada saat menerima kas atau pengeluaran kas dan pendapatan dicatat pada pengeluaran kas.

Pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Langka Besar ialah *cash basis* berarti penerimaan diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum desa.

4.2.2 Proses Akuntansi

Desa Batu Langka Besar proses akuntansinya sudah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). jadi pengumpulan bukti-bukti transaksi yang telah terjadi di desa itu ialah langkah pertama dalam Proses akuntansi Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, menurut IAI-KASP 2015 tahapan proses akuntansi sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Pada tahap pencatatan saat terjadinya transaksi maka harus ada juga bukti transaksi tersebut, kemudian baru dimasukkan kedalam buku kas umum agar

mengetahui dalam transaksi tersebut berupa penerimaan atau pengeluaran kas maupun kredit. Berikut pencatatan yang dibuat oleh desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun:

A. Buku Kas Umum

Desa batu langka besar mencatat semua transaksi pada buku kas umum, penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom penerimaan, dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, salah satu contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas umum:

01 juni 2018 dibayarkan perencanaan kegiatan pembuatan sumur bor RT sebesar Rp313.056

01 juni 2018 dibayarkan belanja modal/materi kegiatan pembuatan sumur bor RT 001 senilai Rp26.305.000

01 juni 2018 dibayarkan belanja cetak dan pengadaan senilai Rp1.510.000

01 juni 2018 dibayarkan belanja penyusunan RPJMDesa senilai Rp5000.000

02 juni 2018 dibayarkan penyusunan APBDes 2018 senilai Rp2.500.000

02 juni 2018 dibayarkan belanja kegiatan PKK senilai Rp10.000.000S

03 juni 2018 dibayarkan belanja perjalanan dinas senilai Rp5.400.000

Tabel 4.1
Buku KasUmum

Pemerintahan Desa Batu Langka Besar
Tahun Anggaran 2018

N O	Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	01/06/ 2018	Pembayaran bahan baku sumur bor	0,00	Rp313.056	001/SPP/12. 05/2018	Rp104.013.056	Rp363.439667
2	01/06/ 2018	Pembayaran belanja modal sumur bor	0,00	Rp26.305.000	002/SPP/12. 05/2018	Rp130.318.056	Rp337.134.667
3	01/06/ 2018	Pembayaran belanja cetak dan pengadaan	0,00	Rp1.510.000	0014/SPP/12 .05/2018	Rp131.828.056	Rp335.624.667
4	01/06/ 2018	Pembayaran belanja penyusunan RPJMDesa	0,00	Rp5.000.000	0015/SPP/12 .05/2018	Rp136.828.056	Rp330.624.667

5	02/06/ 2018	Pembayaran belanja penyusunan APBDes 2018	0,00	Rp2.500.000	0016/SPP/12 .05/2018	Rp139.328.056	Rp328.124.667
6	02/06/ 2018	Pembayaran belanja kegiatan PKK	0,00	Rp10.000.000	0017/SPP/12 .05/2018	Rp149.328.056	Rp318.124.667
7	03/06/ 2018	Pembayaran belanja perjalanan dinas	0,00	Rp5.400.000	0018/SPP/12 .05/2018	Rp154.728.056	Rp312.724.667

*Sumber : Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan
Kabun Kabupaten Rokan Hulu.*

B. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak ialah buku yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak, maka Desa Batu Langka Besar membuat buku Kas Pembantu Pajak. Dalam penyajian buku Kas Pembantu Pajak oleh Desa Batu Langka Besar dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Batu Langka Besar
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	00041/KWT/12.05/2018 Pembayaran belanja alat tulis kantor			
	Potongan pajak PPN pusat	Rp454.546	0,00	Rp454.546
	Potongan pajak PPN pasal 22	Rp68.182	0,00	Rp522.728
2	00002/KWT/12.05/2018 Pembayaran belanja modal/materi kegiatan pembuatan susmur bor RT 001			
	Potongan pajak PPh pasal 22	Rp357.341	0,00	Rp880.069
	Potongan pajak PPN pusat	Rp2.382.273	0,00	Rp3.262.342
3	00054/KWT/12.05/2018 Pembayaran belanja modal/materi kegiatan pembangunan rabat beton 400 m x 2,5 m x 0,112 m			

	Potongan pajak PPN pusat	Rp7.949.727	0,00	Rp11.212.069
	Potongan pajak PPh pasal 22	Rp1.192.459	0,00	Rp12.404.528
4	00064/KWT/12.05/2018			
	Pembayaran belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor			
	Potongan pajak PPN pusat	Rp272.727	0,00	Rp12.677.255
	Potongan pajak PPh pasal 22	Rp40.909	0,00	Rp12.718.164
5	00066/KWT/12.05/2018			
	Pembayaran belanja materai			
	Potongan pajak PPN pusat	Rp909.000	0,00	Rp13.627.164
	Potongan pajak PPh pasal 22	Rp136.350	0,00	13.763.514

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

C. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa ialah buku yang berguna membantu Buku Kas Umum dan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan bank di pemerintahan desa Batu Langka Besar. Selain itu, Buku Bank juga mencatat semua transaksi pendapatan belanja secara transfer maupun tunai. Contoh dari Buku Bank di pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Buku Bank Desa
Pemerintahan Desa Batu Langka Besar
Tahun Anggaran 2018**

BULAN : Januari 2018

NAMABANK : Riau Kepri

No.REK : 1150300096

No	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran	
			Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	B.Admin (Rp)
1	3	4	5	6	7	9
1	Diterima SP2D dana desa tahap I 20%	0002/TBP/1 2.05/2018	Rp156.885.400	0,00	0,00	0,00
2	Diterima SP2D ADD tahap I 20%	0002/TBP/ 12.05/2018	Rp128.110.000	0,00	0,00	0,00
3	Pengambilan ADD dan DD tahap I	0003/CASH/ 12.05/2018	0,00	0,00	Rp277.717.904	0,00

4	Diterima	0003/TBP/1	Rp100.000.000	0,00	0,00	0,00
	bantuan dana	2.05/2018				
	provinsi					

Sumber : Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten

Rokan Hulu

D. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Pada penjelasan Buku Kas Pembantu Kegiatan ini ialah dimana suatu kegiatan yang dilaksanakan di desa Batu Langka Besar dan dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan tersebut. Pada Buku Kas Pembantu Kegiatan yaitu mencatat belanja desa dalam bidang masing-masing seperti penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional perkantoran, kegiatan pengelolaan informasi desa dan kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa RKPDesa. Contoh format tabel Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintahan Desa Batu Langka Besar
Tahun Anggaran 2018

: 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan : 01.02Kegiatan Operasional Kantor Desa

No	Uraian	Penerimaan		Pengeluaran	Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas
		Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembayaran belanja cetak dan pengadaan	Rp1.510.000	0,00	0,00	0,00	Rp9.310.000
2	Pembayaran belanja perjalanan dinas	Rp5.400.000	0,00	0,00	0,00	Rp14.710.000
3	Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Rp3.000.000	0,00	0,00	0,00	Rp17.710.000
4	Pembayaran belanja cetak dan penggandaan	Rp41.000	0,00	0,00	0,00	Rp17.751.000
5	Pembayaran belanja	Rp9.999.000	0,00	0,00	0,00	Rp27.750.000

materai					
---------	--	--	--	--	--

Sumber : Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

2. Tahap Penggolongan

Pada tahap penggolongan ini dilakukanlah pencatatan bukti kedalam kelompok buku besar yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dikelompokkan kedalam debit dan kredit.

Setelah seluruh transaksi dicatat kedalam buku kas umum, langkah selanjutnya yaitu Pemerintahan Desa Batu Langka Besar harus memposting ke dalam buku besar. Buku besar ini bertujuan untuk meringkas data setiap transaksi yang telah dicatat buku kas umum. Oleh sebab itu Pemerintahan Desa Batu Langka Besar semua transaksi yang dicatat pada Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Namun pada Pemerintahan Desa Batu Langka Besar tidak melakukan pencatatan ke dalam buku besar yang sesuai dengan IAI-KASP 2015. Berikut contoh buku besar yang harus dibuat oleh Pemerintahan Desa Batu Langka Besarsebagai berikut:

Tabel 4.5
Buku Besar

Nama Akun : kas

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
1/01/2018	Saldo pindahan	Rp186.472.477		Rp186.472.477	
31/05/2018	Pengambilan ADD dan DD tahap 1	Rp277.717.904		Rp277.717.904	
31/05/2018	Beban penghasilan tetap kades dan perangkat		Rp52.800.000	Rp52.800.000	
31/05/2018	Beban tunjangan kades dan perangkat		Rp4.800.000	Rp4.800.000	

Sumber: data olahan penulis

Tabel 4.6
Buku Besar
Nama Akun : pendapatan transfer

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
23/08/18	Diterima dana desa tahap II	Rp264.000.000		Rp264.000.000	
18/09/18	Diterima dana desa	Rp210.000.000		Rp210.000.000	

Sumber: data olahan penulis

4.7
Buku Besar

Nama Akun :Belanja Pegawai

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2018	Saldo Awal				
31/05/2018	Pembayaran honor pegawai		Rp2.800.000	Rp2.800.000	
31/05/2018	Pembayaran insentif RW		Rp6.000.000	Rp6.000.000	
31/05/2018	Pembayaran tunjangan kades dan perangkat		Rp4.800.000	Rp4.800.000	

31/05/2018	Pembayaran insentif RT		Rp14.300.0000	Rp14.300.000	
31/05/2018	Pembayaran gaji kades dan karyawan		Rp52.800.000	Rp52.800.000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Tabel 4.8
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2018	Saldo awal				
02/06/2018	Penyusunan APBDes		Rp2.500.000	Rp2.500.000	
02/06/2018	Kegiatan PKK		Rp10.000.000	Rp10.000.000	
01/06/2018	Penyusunan RPMJDesa		Rp5.000.000	Rp5.000.000	
01/06/2018	Cetak dan pengadaan		Rp1.510.000	Rp1.510.000	
03/06/2018	Perjalanan dinas		Rp5.400.000	Rp5.400.000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

3. Tahap Pengiktisaran

Pemerintah Desa Batu Langka Besar dalam melakukan pengikhtisaran yang dicatat kedalam buku kas umum dan buku besar. Pencatatan neraca saldo untuk meyakinkan bahwa proses yang dibuat sudah benar. Dengan membuat neraca saldo ini memudahkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun Pemerintah Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum membuat neraca saldo sesuai dengan IAI.KASP.

4. Penyesuaian Data

Siklus akuntansi pada penyesuaian data yang dibuat oleh pemerintah desa Batu Langka Besar, desa Batu Langka Besar belum membuat penyesuaian data disebabkan karena desa Batu Langka Besar masih menggunakan proses pencatatan transaksi dasar pengakuan *cash basic*.

a. Persediaan

Dalam setiap kegiatan yang ada pada pemerintah desa Batu Langka Besar yaitu berkaitan dengan aset lancar baik dalam bentuk barang maupun perlengkapan habis pakai. Dengan menggunakan nilai pembelian akhir maka Akun Persediaan dilakukan dengan menghitung sisa persediaan yang masih, bahan habis pakai yaitu barang yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian dalam kegiatan entitas sehari-hari. Contohnya seperti: benda pos dan materai, alat tulis kantor, blangko, dll. Disini pemerintahan desa Batu Langka Besar tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode, seharusnya desa Batu Langka Besar harus menghitung nilai persediaan akhir periode agar dapat menyajikan nilai yang sebenarnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

b. Aset tetap

Pada laporan keuangan pemerintah desa Batu Langka Besar yang terdapat pada aset tetap di Laporan Kekayaan Milik Desa seperti peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi yang dijelaskan sesuai Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI-KASP-2015). Pada laporan aset yang

dimiliki desa harus dilaporkan setiap tahunnya, tetapi laporan aset tetap pada pemerintahan desa Batu Langka Besar tidak menyajikan aset tetap sebelumnya (2017) pada aset tetap tahun selanjutnya (2018). Contohnya sebagai berikut: peralatan mesin Rp18.400.000, gedung dan bangunan Rp104.683.600 ditahun 2017 bersaldo ahir Rp123.083.600. Namun terjadi pengeluaran modal untuk tahun selanjut nya untuk gedung dan bangunan Rp344.143.070, gedung dan bangunan Rp76.969.000 ditahun 2018. Akan tetapi pada laporan kekayaan milik desa tidak menambahkan saldo ahir ditahun tersebut (2017) kedalam saldo ahir ketahun selanjutnya (2018). Berikut perhitungan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perhitungan Nilai Aset Tetap Periode 2017 dan 2018

Aset Tetap	Diperoleh		Total aset yang diperoleh tahun 2018
	2017	2018	
Peralatan dan Mesin	Rp18.400.000	Rp344.143.070	Rp362.143.070
Gedung dan Bangunan	Rp104.683.600	Rp76.969.000	Rp181.652.600
Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	Rp565.451.870	Rp565.451.870

Sumber: perhitungan nilai Aset Tetap Desa Batu Langka Besar periode 2017 dan 2018

5. Tahap Pelaporan Keuangan

Pada tahap laporan keuangan merupakan tahap ahir dari proses akuntansi. Pada

tahap ini Laporan yang disajikan oleh Pemerintahan Desa Batu Langka Besar, “Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Dalam laporan keuangan Pemerintah Desa Batu Langka Besar sudah menggunakan komputerisasi dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kemudian bendahara desa tersebut membuat hasil dari buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, inventaris dan sebagainya kemudian diolah kedalam sistem keuangan desa barulah terbentuknya laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Dilaporan realisasi pelaksanaan APBDes yaitu laporan yang memberikan informasi tentang realisasi pendapatan desa, belanja desa, transfer desa, surplus/defisit desa, pembiayaan desa dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) desa yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam dalam satu periode. Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Kekayaan Desa

Laporan kekayaan milik desa ialah laporan yang berisi tentang kekayaan yang ada didesa tersebut. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tentang “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dimana Laporan Kekayaan Milik Desamenyajikan Laporan yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember per tahun. Yang dapat

diperoleh serta dapat diukur dengan uang kemudian aset desa dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar itu merupakan kekayaan asli milik desa, aset lancar yaitu aset yang bisa dicairkan menjadi uang seperti kas, piutang dan persediaan sedangkan aset tidak lancar yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari setahun seperti tanah, jalan, jaringan, gedung dan yang lainnya. Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Laporan Kekayaan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum yang mana pada Pemerintahan Desa Batu Langka Besar terdapat kesalahan Pada laporan aset yang dimiliki desa harus dilaporkan setiap tahunnya, tetapi laporan aset tetap pada pemerintahan desa Batu Langka Besar tidak membuat aset tetap sebelumnya (2017) pada aset tetap tahun selajutnya (2018). Contohnya sebagai berikut: peralatan mesin Rp18.400.000, gedung dan bangunan Rp104.683.600 ditahun 2017 bersaldo ahir Rp123.083.600 dalam mengakumulasikan aset tetap tahun 2017 ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa di tahun 2018 seharusnya nilai aset tetap di tahun 2018 adalah dengan menambahkan aset tetap 2017 dengan pengeluaran modal tahun 2018 Format Laporan Kekayaan Milik Desa Sebagai berikut:

Tabel 4.10
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintahan Desa Batu Langka Besar
Tahun 2018

KODE	URAIAN	TAHUN	
		Tahun saat ini 2018	Tahun sebelumnya 2017
1	2		
I.	ASET DESA		
A.	Aset Lancar		
	Kas Dan Bank	Rp186.139.408	Rp478.566.161
a.	Kas di Bendahara Desa	Rp119.019.636	Rp294.452.564
b.	Rekening Kas Desa	Rp67.119.772	Rp184.113.597
	Piutang		
a.	Piutang Sewa Tanah		
b.	Piutang Sewa Gedung		
c.	dst.....		
	Persediaan		
a.	Benda pos dan materai		
b.	Alat tulis kantor		
c.	Blangko dan barang cetakan		
	JUMLAH ASET LANCAR	Rp186.139.408	Rp478.566.161

B.	ASET TIDAK LANCAR		
1.	Investasi Permanen		
	- Penyertaan Modal pemerintah desa		
2.	ASET TETAP		
	- Tanah		
	- Peralatan dan Mesin	Rp344.143.070	Rp18.400.000
	-Gedung dan Bangunan	Rp76.969.000	Rp104.683.600
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp565.451.870	-
	- Aset Tetap lainnya	Rp986.563.940	Rp123.083.600
3.	DANA CADANGAN		
a.	Dana Cadangan		
b.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp986.563.940	Rp123.083.600
	JUMLAH ASET (A+B)	Rp1.172.703.348	Rp601.649.761
II.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp82.433.680	Rp62.234.057
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(Rp82.433.680)	(Rp62.234.057)
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	Rp1.090.269.668	Rp539.415.704

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

BAB V

P ENUTUP

Dalam semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas. Maka penulis akan menarik kesimpulan dan saran pada bab ini yang berguna bagi seterusnya.

5.1 Kesimpulan

- 1 Pencatatan yang dilakukan oleh Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu menggunakan *cash basic*. Dimana dalam proses transaksinya dicatat saat menerima atau pada saat mengeluarkan kas dan dimasukan komputerisasi dan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES).
- 2 Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum membuat akun-akun buku besar,buku besar pembantu.
- 3 belum melakukan penyesuaian terhadap nilai persediaan pada akhir tahun dan tidak mencantumkan nilai aset tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan milik desa Pemerintahan Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- 4 Penerapan akuantansi pada Desa Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai IAI-KASP.

5.2 Saran

- 1 Desa Batu Langka Besar sebaiknya menggunakan siklus akuntansi yang terdiri dari: tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan
- 2 Desa Batu Langka Besar sebaiknya membuat buku besar dan buku besar pembantu agar lebih mudah membuat neraca saldo.
- 3 Seharusnyamenghitung penyesuaian terhadap nilai persediaan pada akhir periode supaya nilai yang disajikan dapat terperinci dan jelas pada Pemerintahan Desa Batu Lagka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu melakukan perhitungan terhadap aset tetap.
- 4 Disarankan Desa Batu Langka Besar mengikuti pedoman asistensi akuntansi keuangan desa sesuai IAI-KASP 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Catur, Sasongko. dkk. 2016. *Akuntansi Suatu Pengantar-Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martini, Dwi. dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M. Mamduh dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harti, Dwi. 2011. *Modul Akuntansi I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1-Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rudianto. 2014. *Pengantar Akuntansi-Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi: Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. 2012. *Perencanaan Desa Terpadu* Cetakan Kedua. Yogyakarta: Read.
- Warren, Carl S. Reeve, James M. Fes, dkk 2014. *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia*, Edisi 25 Terjemahan Novrys Suhandianto dan Devi S Kalanjati. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia-KSAP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau